

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH

Konflik Suriah merupakan salah satu fenomena *Arab Spring* yang terjadi di Timur Tengah. Suriah bukan negara pertama yang menerima dampak dari gelombang revolusi ini. Negara-negara seperti Mesir, Libya, Tunisia merupakan negara yang sudah merasakan dampak dari angin revolusi yang menerjang dunia Arab. Fenomena *Arab Spring* merupakan suatu fenomena yang berlangsung di kawasan Timur Tengah pada akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena Arab Spring. Pertama, karena Timur Tengah memiliki kultur budaya yang sama yaitu bangsa Arab. Kaum Muslim mendominasi dan dulunya berjaya namun kemudian terpecah belah dalam beberapa negara. Negara-negara di kawasan Timur Tengah merupakan bekas negara jajahan bangsa Eropa seperti Prancis dan Inggris. Kedua, negara-negara Timur Tengah meskipun telah menjadi negara yang merdeka, namun pada dasarnya belum seutuhnya menjadi negara yang merdeka. Kebebasan masyarakat dibatasi dengan sistem pemerintahan yang otoriter dan penguasa yang diktator yang berlangsung di beberapa negara Timur Tengah (Phillips, 2012).

Ketiga, beberapa negara di Timur Tengah masih mengalami kemiskinan dan masalah pada jumlah pengangguran yang tinggi. Kesejahteraan masyarakat belum terpenuhi walaupun Timur Tengah merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alamnya terutama minyak. Keempat, Adanya undang-undang darurat memberikan

keleluasaan kepada aparat pemerintah untuk menangkap dan menahan warga sipil tanpa proses peradilan terhadap segala tindakan yang dilakukan serta dianggap mengancam keamanan nasional.

A. Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Hubungan antar negara menjadi hal yang sangat penting guna mempertahankan eksistensi negara di kancah internasional. Tatanan dunia internasional yang sudah berbeda dari sebelumnya menuntut negara-negara di dunia untuk melakukan kerjasama dengan negara lain, baik itu kerjasama bilateral maupun multilateral. Dewasa ini, dunia hubungan internasional tidak semata-mata membicarakan tentang peristiwa monumental yang mempengaruhi tatanan dunia seperti PD I, PD II, Peran Dingin dan peristiwa monumental lainnya. Kini setiap negara-bangsa mempunyai kepentingan masing-masing yang dicetuskan melalui politik luar negerinya. Dalam setiap politik luar negeri ada kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh para aktor negara hal ini relevan dengan apa yang dikemukakan oleh H.J Morgenthau bahwa, dalam mempelajari politik luar negeri, ada sebuah diktum yang berlaku universal berbunyi politik luar negeri selalu dilandasi oleh kepentingan nasional demi mencapai tujuan-tujuan nasional negara-bangsanya. Tujuan nasional sebenarnya merupakan elaborasi kepentingan-kepentingan nasional negara bangsa tersebut (Morgenthau, 1977). Dalil universal ini menunjukkan hubungan tidak terpisahkan antara politik luar negeri sebagai alat/instrumen interaksi negara-bangsa dalam politik internasional

selalu didorong dan dikendalikan oleh motivasi mencapai kepentingan nasional tertentu (Wicaksana, 2007).

Konsep politik luar negeri yang telah dianut dan digunakan mempunyai pengertian yang berbeda dari beberapa kalangan seperti akademisi, jurnalis birokrat, dan politisi. Tetapi ironisnya bila ditanyakan kepada mereka tentang makna sesungguhnya dari politik luar negeri, akan muncul jawaban yang beraneka ragam dari para kalangan tersebut. Pada kenyataannya tidak ada suatu konsensus universal menyangkut definisi konseptual tentang politik luar negeri. Setiap akademisi, jurnalis, birokrat dan politisi memiliki interpretasi masing-masing yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan serta psikologis mereka. Hal ini menyebabkan politik luar negeri cenderung difahami sebagai terminologi umum yang merujuk pada sejumlah atribut yang sering pula kurang konsisten (Wicaksana, 2007).

Kesulitan dalam mendefinisikan politik luar negeri disebabkan antara lain karena ketidakjelasan bentuk ataupun wujud politik luar negeri tersebut. Menurut beberapa ilmuan politik dan hubungan internasional, berangkat dari ketidakjelasan bentuk ataupun wujud yang dimaksud, maka sudah seharusnya perdebatan soal definisi dikesampingkan saja. Mereka muncul dengan sebuah cara pandang yang longgar dan luas, dalam hal ini politik luar negeri mencakup sejumlah mekanisme dan proses yang dilakukan oleh suatu sistem politik nasional guna menanggapi dinamika perubahan lingkungan eksternal dimana tujuan-tujuannya hendak diperjuangkan (Mas'oed, 1989).

Definisi di atas mendeskripsikan politik luar negeri memiliki setidaknya tiga elemen dasar yang pertama mekanisme dan sistem, kedua lingkungan eksternal yang selalu dinamis, dan ketiga tujuan yang mau diraih, adanya ketiga elemen ini merupakan gambaran yang lazim ditemukan pada pendefinisian konsep keputusan politik. Asumsi yang diberlakukan untuk politik luar negeri ialah menyamakannya dengan keputusan politik atau kebijakan nasional pada umumnya. Hanya bedanya terletak pada penekanan keputusan atau kebijakan politik luar negeri berorientasi keluar yuridiksi negara yakni kepada aktor-aktor hubungan internasional yang lain. Definisi ini mengandaikan politik luar negeri seperti instrumen untuk berinteraksi di zona internasional (Wicaksana, 2007).

Terdapat satu aspek yang lemah bila dicermati pada definisi di atas. Elemen respon atau tanggapan dari sistem politik nasional, masih menyimpan beberapa ketidakjelasan di dalamnya. Beberapa pendapat menyatakan bahwa respon bisa saja meliputi aksi, reaksi militer, sikap diplomatik tertentu, ide atau gagasan, doktrin/ideologi, tindakan-tindakan persuasif dan kooperatif, strategi non blok, dan lain sebagainya sejauh semua berkonteks nasional yang orientasinya ke luar negeri (Azhar, 1993). Dengan demikian pendefinisian politik luar negeri tidak memperlihatkan spesifikasi bentuk/wujudnya. Persoalan ini akan membawa manakala menganalisis proses perumusannya. Berpijak dari bentuk ataupun wujud yang mungkin sekali juga diproses melalui banyak faktor termasuk kondisi psikologis pemimpin nasional, daya intelektualitas aktor yang terlibat, sikap dan tindakan politik

yang tersamar, motivasi-motivasi individual serta kelompok, yang seluruhnya bersifat multipretatif.

Sebelum melangkah terlalu jauh dalam menjelaskan tentang politik luar negeri peneliti mencoba untuk membedakan terlebih dahulu perbedaan dari politik luar negeri dan kebijakan luar negeri. Perbedaan yang secara sederhana dapat dipahami dari politik luar negeri dan kebijakan luar negeri ialah politik luar negeri merupakan identitas suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Sedangkan kebijakan luar negeri merupakan implementasi dari sebuah corak politik luar negeri suatu negara tertentu. Dari perbedaan tersebut peneliti mencoba untuk menjelaskan secara singkat dengan tujuan memberikan batasan terhadap konsep yang akan digunakan untuk melihat fenomena yang akan diteliti tetapi, peneliti juga tetap menggunakan kebijakan luar negeri dalam melihat fenomena yang akan diteliti.

Terdapat dua konsep yang menjadi inti pembahasan politik luar negeri dan kebijakan luar negeri. Yang pertama adalah kepentingan nasional (*national interest*). Yang kedua adalah konsep *power*. *Power* biasanya identik dengan penggunaan pengaruh yang bersifat memaksa individu atau negara lain melakukan sesuatu tindakan yang tidak dikehendakinya atau tidak dikehendaki oleh anggota komunitas lain. Lebih lanjut *nasional power* yang dikategorikan Joseph Nye menjadi dua, yakni *hard power* dan *soft power*. Ia mendefinisikan *hard power* sebagai kemampuan untuk mengubah apa yang pihak lain lakukan (*what others do*), sedangkan *soft power* didefinisikan sebagai kemampuan untuk dapat mempengaruhi dan membentuk apa yang pihak lain

inginkan (*what others want*) (Masita). Jika merujuk pada pernyataan Joseph Nye serta mengaitkannya dengan peran aktor negara pasca serangkaian peristiwa monumental seperti perang dunia. Maka negara saat ini cenderung menerapkan *soft power* dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Tidak terkecuali AS sebagai negara besar yang mempunyai pengaruh di dunia internasional dewasa ini. Peneliti akan mencoba memberikan gambaran tentang pola perilaku politik luar negeri AS melalui pendekatan histori dan sikap hidup AS dalam prinsip politik luar negerinya.

Amerika dikenal sebagai bangsa yang menganut paham demokrasi liberal yang mencakup asas demokrasi dalam bidang politik, kapitalisme dalam bidang ekonomi dan individualism yang terkait dengan kedudukan dan hak asasi manusia. Selain liberalisme, sikap hidup masyarakat Amerika dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang telah disepakati semenjak awal berdirinya negara ini. Nilai budaya tersebut tercakup dalam konsep-konsep: *The American Dreams*, *Myflower Compact*, *Manifest Desteny*, dan *City Upon A Hill*. Telah dijelaskan selain konsep-konsep di atas, masyarakat Amerika menganut paham: demokrasi liberal, kapitalisme, dan individualisme yang berakar pada liberalisme. Berlandaskan pada ideologi di atas dan ditunjang oleh ajaran dan keyakinan yang tercakup di dalam berbagai konsep di atas, masyarakat Amerika menganut falsafah pragmatisme. Dari berbagai elemen ini terbentuklah sikap hidup liberal pragmatis yang mewarnai sikap hidup sehari-hari dan prinsip-prinsip politik luar negeri Amerika (Minderop, 2006).

Manifest perilaku pragmatis yang memengaruhi padangan politik, khususnya politik luar negeri, menempatkan bangsa Amerika sebagai bangsa yang unik dan penuh paradoks. Kondisi ini terjadi akibat dari pengalaman Amerika yang senantiasa dijadikan patokan dalam hubungan dengan negara lain. Seorang pemimpin yang dikatakan pragmatis memiliki sikap antara lain: tidak jelas tujuan ideologisnya, agak mengabaikan moralitasnya, praktis, oportunistik, pandai membaca situasi, fleksibel, pandai bernegosiasi, menghindari keputusan ekstrem, dan menganggap segalanya memungkinkan. Prinsip politik demikian bahkan dianut oleh beberapa presiden Amerika yang dianggap sebagai presiden yang ideal, antara lain: J.K. Kennedy dan G.W. Bush. Berdasarkan prinsip politik demikian batasan idealisme dan pragmatisme di Amerika menjadi kabur. Adapun mamfaat yang menjadi pertimbangan adalah mamfaat ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta yang terpenting mempertahankan keunggulan.

Sikap pragmatisme dalam bidang politik tampak dalam tindakan Amerika dengan memberlakukan berbagai doktrin sebagai pertahanan dalam bidang politik, misalnya dikeluarkannya: doktrin Monroe (1823), *Open Door Policy*, doktrin Truman (1947), doktrin Jhonson (1965), dan doktin Carter (1980). Pragmatisme sebagai *the way of life* bangsa Amerika mempengaruhi sikap politik luar negeri mereka melalui cara perilaku pragmatis. Salah situ ciri khas pragmatis Amerika adalah sebagai ‘pendamai’ pertentangan antara empirisme dan rasionalisme. Pemikiran ini lahir karena filsafat yang selama ini dianggap tidak cukup mampu mengatasi masalah

manusia dan kemanusiaan. Analisis intelektual dan tingkah laku di Amerika menyimpulkan bahwa di antara semua model pemikiran, pragmatisme dipandang sebagai prinsip bangsa Amerika yang paling unik. Dengan demikian pragmatisme telah menjadi pandangan hidup bangsa Amerika yang secara eksplisit diterapkan dalam politik pada umumnya (Minderop A. , 2006).

Kebijakan luar negeri Amerika pada dasarnya dilandasi oleh persepsi pentingnya membina hubungan dengan negara lain demi mamfaat yang diperoleh dari hubungan perdagangan. Melalui pemasyarakatan pentingnya hak asasi manusia dan perdamaian dunia, Amerika mengharapkan keuntungan dalam perdagangan maka hubungan dengan negara lain perlu dijalin semaksimal mungkin.

Politik luar negeri Amerika dikenal unik. Keunikan ini terjadi karena Amerika tidak pernah konsisten dengan apa yang pernah dianut atau dijalankan, mereka selalu berubah-ubah tergantung pada berbagai aspek. Sejak akhir abad ke 18 hingga Perang Dunia II politik luar negeri Amerika bersifat isolationis, walaupun pada praktiknya tidak demikian karena pada era Wodrow Wilson Amerika sudah terlibat dalam Perang Dunia I. Setelah Perang Dunia II sikap politik mereka disebut internasionalisme. Prinsip ini dikarenakan Amerika mencoba memadukan elemen idealisme dan humanitarianise, realisme politik dan pertimbangan kekuasaan, oportuniste, diplomasi personal, dan megantisipasi kelesuan dan ketidakpedulian dunia di luar Amerika. Amerika juga meyakini bahwa mereka harus bersikap selektif menangani masalah hubungan luar negeri, maksudnya mereka memperlakukan tiap

negara secara berbeda, misalnya, bantuan luar negeri Amerika terhadap negara-negara yang terancam komunisme berbeda dengan bantuan yang diberikan kepada negara dengan kasus berbeda, misalnya, terhadap Israel.

Bila Amerika berpegang pada ajaran pragmatisme, maka non-intervensi merupakan prinsip politik luar negeri. Namun bila dihadapkan pada idealisme Amerika untuk mendemonstrasikan dunia maka non-intervensi tidak mungkin diterapkan sepenuhnya. Masalahnya, pragmatisme Amerika menerjemahkan intervensi Amerika sebagai intervensi militer, pada dasarnya bertentangan dengan ajaran tersebut. Namun bila dihadapkan pada prinsip politik Amerika yang anti terhadap ancaman-ancaman negara lain, misalnya ketika era komunisme, maka kerap kali intervensi militer harus dilaksanakan. Era kini ancaman baru telah pula menghadang Amerika, yaitu yang mereka namakan dengan ancaman terorisme.

Dikaitkan dengan ajaran pluralisme, ketika manusia hidup di alam semesta yang pluralistik, dengan hakikat manusia yang juga pluralistik, maka konsistensi kerap kali tidak mungkin dilakukan secara murni. Menurut pluralisme, manusia bertindak dalam menjalani kehidupan atau menghadapi masalah tidak selalu berpegang pada suatu prinsip. Cara-cara menangani masalah tergantung pada situasi dan kondisi, inkonsistensi merupakan hal yang dimungkinkan, walaupun suatu tindakan kerap kali diwarnai oleh sikap paradoksial dan kontroversi. Jadi, pluralisme dalam politik luar negeri Amerika beraneka ragam, bebas memilih, dan tergantung

pada prinsip politik mutakhir dan sistem pemerintahan yang mengacu pada pengalaman.

Seperti dijelaskan di atas, pragmatisme politik luar negeri Amerika sangat dipengaruhi oleh tradisi dan latar belakang sejarah mereka yang hadir melalui pengalaman. Selain itu, pengaruh kebijaksanaan ideologis juga memegang peran dalam hal ini. Kebijakan ini menghasilkan, antara lain: lahirnya doktrin Monroe, *The Open Door Policy*, 'Demokrasi' Woodrow Wilson dalam proses diplomasi, sikap penolakan Roosevelt terhadap ekspansionisme kelompok Axis, usaha Amerika mencari dukungan untuk Perserikatan Bangsa-bangsa, keyakinan pemerintahan Truman akan bahaya komunisme bagi perdamaian dan kesejahteraan internasional, pemerintahan Kennedy tentang bangkitnya Dunia Ketiga, komitmen Carter tentang pentingnya HAM di luar negeri serta perannya mendamaikan Israel-Mesir, serta diplomasi Reagan di Amerika Tengah dan tumbangannya beberapa negara komunis.

Demikianlah hasil yang telah dicapai Amerika seperti yang dijelaskan di atas terkait dengan cita-cita dan nilai-nilai ideologis bangsa. Konsep pragmatis yang terdapat di dalam ideologi politik luar negeri Amerika menekankan cita-cita selalu selaras dengan sikap hidup Amerika. Dengan demikian, politik luar negeri Amerika harus berdasarkan standar tradisi, historis, dan ideologi. Oleh karena itu, pergantian pimpinan negara tidak serta merta mengubah kebijakan luar negeri Amerika. Politik luar negeri mereka seakan-akan sudah terpola walau siapa pun yang menjadi pimpinan negara. Hal ini disebabkan oleh mereka yang menganggap ideologi

demokrasi liberal yang terbaik berdasarkan pengalaman dan sejarah bangsa. Selama ini Amerika banyak mengandalkan kekuasaan dalam diplomasinya (Minderop A. , PRAGMATISME Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika, 2006).

Secara teoritis pada konsep politik luar negeri Amerika dalam menjalin hubungan dengan negara lain di dunia untuk mencapai kepentingan nasional (Amerika dan Dunia), terdapat empat *framework* utama. Empat *framework* itu singkatnya dikenal sebagai kerangka kerja politik luar negeri Amerika untuk mencapai kepentingan nasional, yang terdiri dari *power*, *peace*, *prosperity*, dan *principles* (Trubowitz, 2014).

1. *Power* (kekuatan)

Power adalah syarat kunci dalam merumuskan dasar tujuan Amerika menguasai dunia, pertahanan diri dan pemeliharaan kemerdekaan dan teritorial nasional. *Power* mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya agresi dan sangat penting untuk menyebarkan pengaruh terhadap negara lain. *Power* merupakan kunci utama dalam memelihara pertahanan yang kuat dan pencegahan kredibel. *Power* memungkinkan aktor untuk membentuk sesuai dengan refleksi kepentingannya. *Power* juga memungkinkan Amerika untuk memelihara keamanan, menangkis dan menaklukkan setiap ancaman terhadap keamanan negara. *Power* bisa mendesak justifikasi penggunaan kekuatan militer. Dalam konteks Amerika masih menggunakan pendekatan pandangan-pandangan realis.

Sebagai konsekuensi dari hal ini, terdapat empat poin utama:

1) Negara mengejar kepentingan-kepentingan tidak untuk perdamaian

Konteks inilah yang membangun perilaku Amerika dalam menjalankan politik luar negerinya. Amerika tidak segan untuk mengumandangkan perang dengan pihak lain jika merasa kepentingannya terganggu. Amerika lebih memilih memilih untuk melakukan tindakan agresi, perang, dan tindakan koersif semacamnya dengan alasan dan seruan untuk menciptakan perdamaian.

2). Politik dan kekuasaan militer adalah hal utama yang harus diedarkan

Bagi Amerika usaha untuk mempertahankan keamanan lebih penting dari hanya sekedar upaya pemeliharaan keamanan. Artinya, Amerika lebih cenderung menggunakan strategi-strategi difensif ketimbang deteren

3). Kekuasaan ekonomi dan aspek-aspek kemakmuran lainnya menjadi nilai penting bagi kekuasaan militer

Ekonomi Amerika telah membuat dan menjadikan Amerika kuat sebagai pesaing utama dalam kancah global. Hal itu karena didukung oleh berbagai penemuan dan inovasi teknologi. Keadaan itu telah membuat Amerika menjadi aktor utama dalam penguasaan teknologi mutakhir dunia. Selain itu untuk menjaga kondisi demikian, diperlukan dukungan penuh dari

aspek politik, dimana sebagai bentuk komitmennya alokasi dana pertahanan di Amerika adalah yang terbesar di dunia.

4). Meskipun prinsip-prinsip seperti demokrasi dan hak asasi penting, namun tetap harus mendukung penuh eksistensi *power*.

2. *Prosperity* (kemakmuran)

Politik luar negeri Amerika, utamanya dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran. Dalam motivasi ini terdapat beberapa kepentingan ekonomi dalam politik luar negeri Amerika, diantaranya:

1. Kebijakan-kebijakan untuk menurunkan tarif impor dalam hubungan dagangnya dengan negara lain.
2. Menciptakan pertumbuhan pasar untuk produk-produk ekspor Amerika
3. Penanaman investasi luar negeri yang menguntungkan bagi Amerika
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik, dll.

Banyak teori yang menekankan bahwa penekanan utama politik luar negeri Amerika adalah faktor-faktor ekonomi. Secara umum, penekanan ekonomi dalam politik luar negeri Amerika dibagi menjadi dua prinsip. Pertama, politik luar negeri Amerika ditekankan untuk mencapai keuntungan ekonomi bagi Amerika. Indikatornya adalah keseimbangan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi makroekonomi yang sehat. Untuk mencapai tujuan ini, dalam memasuki abad ke 21 politik luar negeri Amerika menekankan efektifitas lembaga-lembaga

internasional yang dirancangnya untuk meningkatkan keuntungannya (IMF, WTO, dan World Bank). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa eksistensi dari ketiga lembaga ini adalah dalam rangka untuk menjalankan politik luar negeri Amerika demi mencapai *prosperity*.

5. *Peace* (perdamaian)

Peace secara filosofis dilihat sebagai tujuan dalam menjawab pertanyaan untuk apa *power* diamankan. Secara prinsip, Amerika memosisikan diri sebagai pejuang keamanan dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh perjalanan sejarah dan prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh oleh bangsa Amerika. Untuk mewujudkan *peace* Amerika tidak segan-segan untuk mengumandangkan perang. Dalam politik luar negeri Amerika ini lebih dikenal sebagai ‘perang untuk mengakhiri perang’.

6. *Principles* (prinsip)

Tujuan politik luar negeri Amerika yang keempat adalah prinsip. Prinsip itu meliputi nilai, idealisme, dan kepercayaan. Untuk prinsip ini politik luar negeri Amerika utamanya untuk menyebarkan akar-akar idealisme demokrasinya ke seluruh dunia. Oleh para pemikir Amerika yang melahirkan demokrasi seperti Thomas Jefferson, hanya bentuk pemerintahan republik yang demokratis yang menghargai hak asasi manusia, berarti demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang perlu dijaga dan dikembangkan di dunia. Dalam konteks ini, tindakan politik

luar negeri Amerika tidak dapat dilepaskan dari upaya menyebarkan prinsip-prinsip negaranya ke seluruh dunia (Trubowitz, 2014).

Keempat dalam tataran teoritis inilah yang menjadi landasan bagi para pemimpin Amerika dalam menjalankan politik luar negeri dan menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain. Meskipun kebijakan yang diambil masing-masing oleh kepala negara dikemas dengan tambilan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya politik maupun kebijakan luar negeri yang diterapkan tetap akan bersandar dan tidak terlepas dari keempat prinsip tersebut (Sitorus, 2018).

B. Politik Luar Negeri Amerika di Timur Tengah

Timur Tengah terus menjadi perhatian utama kebijakan luar negeri Amerika sejak Perang Dunia II. Arti penting dari kawasan Timur Tengah telah meningkat pesat sejak World War II (WWII) terutama karena faktor ekonomi, strategis, dan politik. Secara budaya, wilayah ini memiliki banyak kesamaan dengan Barat, sejak zaman perang salib di abad pertengahan dan berlanjut melalui sejarah modern dengan upaya para misionaris Barat dan kegiatan pendidikan mereka. Timur Tengah sendiri terdiri dari tiga benua: Eropa, Asia, dan Afrika (Sarhan, 2017).

Istilah “Timur Tengah” relatif baru. Pada tahun 1902, nama ini muncul dalam serangkaian artikel dalam surat kabar harian Inggris: *The Times*. Baru setelah Perang Dunia II istilah “Timur Tengah” diterima secara luas, terutama di lembaga-lembaga akademik dan pemerintah. Dalam penjelasan kali ini akan

dijelaskan pola hubungan Amerika dan Timur Tengah serta tujuan utama dari politik luar negeri Amerika di Timur Tengah.

Sebelum Perang Dunia I dimulai perdagangan Amerika dengan Timur Tengah telah berlangsung lebih dari dua ratus tahun. Bahkan kontak komersial antara Smyrna (sebuah kota kuno di Turki) dan Boston dimulai sejak 1767, ketika produk Smyrna (terutama buah ara) muncul di Amerika. Selain itu, sebuah rumah perdagangan Amerika didirikan di Smyrna pada tahun 1811, meletakkan dasar untuk perjanjian pertama Ottoman-Amerika yang ditandatangani pada 7 Mei 1831. Tidak hanya perdagangan kegiatan lain juga dilakukan oleh kelompok agama Amerika, terutama Presbiterian. Mereka melakukan beberapa misi di Timur Tengah yang tidak hanya agama, tapi amal dan medis juga. Para misionaris Amerika di Timur Tengah muncul pertama kali pada awal 1820, *ketika American Board of Commissioners for Foreign Missions* didirikan pertama kali di negara ini. Para misionaris Amerika dan organisasi filantropi mulai pergi ke Timur Tengah untuk melaksanakan pelayanan mereka kepada penduduk (Sarhan, 2017).

Kegiatan yang dilakukan oleh para misionaris ini dengan tujuan untuk memberikan pengaruhnya dan melakukan modernisasi pendidikan di wilayah tersebut. Mereka mendirikan lembaga seperti Robert College di Turki yang didirikan pada tahun 1863, Suriah Protestan College yang kemudian berganti nama menjadi American University of Beirut (AUB) yang didirikan pada tahun 1866, Istanbul Women's College 1871, dan The American University of Cairo pada tahun 1919. AUB menjadi (setidaknya di beberapa bidang) lembaga

pendidikan tinggi yang paling menonjol di Timur Tengah. Pada akhir abad ke 19, AUB adalah pusat yang sangat berpengaruh bagi kemuculan dan promosi nasionalisme Arab. Kontribusi ke pendidikan tinggi membuat Amerika populer di mata penduduk lokal, dan kurangnya motivasi politik Amerika memperkuat niat baik umum menuju demokrasi Amerika.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelas bahwa sebelum kontak Perang Dunia I, hubungan Amerika dengan kawasan Timur Tengah hanya sebatas komersial, misionaris, dan kegiatan pendidikan. Runtuhnya kekuasaan Ottoman pada akhir Perang Dunia I menempatkan seluruh wilayah Timur Tengah berada di bawah pengaruh Eropa. Negara seperti Mesir, Irak, Palestina, dan Transyordania berada di bawah mandat Inggris, sedangkan negara-negara Afrika Utara, Lebanon, dan Suriah berada di bawah mandat Prancis. Sebaliknya, Amerika menunjukkan sedikit minat dalam urusan internasional (dalam artian melakukan penguasaan atas suatu wilayah) pada umumnya selama dan setelah Perang Dunia I. Akan tetapi, setelah Perang Dunia I, meskipun kawasan Timur Tengah berada di bawah pengaruh Eropa, kontak Amerika terutama perusahaan minyak bumi dengan wilayah ini terus meningkat.

Periode antara dua perang dunia menunjukkan bahwa Amerika tetap hanya sedikit terlibat dalam urusan Timur Tengah dari sudut pandang politik. Disisi lain Amerika telah mendirikan beberapa kontak ekonomi di kawasan Timur Tengah. Pada akhir Perang Dunia II, keseimbangan kekuatan baru menang di arena internasional. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua negara adidaya

dalam sistem internasional. Kekuatan utama Eropa (Inggris dan Prancis) menghadapi kesulitan ekonomi substansial dan tidak lagi mampu memainkan peran tradisional terkemuka mereka di Timur Tengah. Pada bulan Februari 1955, Amerika membentuk Pakta Organisasi Baghdad dikenal sebagai *Middle East Treaty Organization* (METO). Tujuan utama dari METO adalah untuk membatasi kemungkinan ekspansi Uni Soviet di kawasan Timur Tengah (Sarhan A. S., 2017).

Awal 1990-an, era Perang Dingin berakhir dan ancaman Uni Soviet di kawasan Timur Tengah juga berakhir, dengan dampak komunisme internasional pada titik terendah dalam beberapa dekade. Sebagai hasil dari Perang Dingin, Amerika menjadi negara adidaya dominan tunggal di era pasca-Perang Dingin. Hegemoni, kepemimpinan, keutamaan, dan kekuatan militer ditandai dengan jelas pada politik luar negerinya dalam urusan internasional pada akhir abad kedua puluh dan awal abad kedua satu.

Singkatnya, Timur Tengah terus menjadi perhatian utama dari politik luar negeri Amerika sejak Perang Dunia II. Khususnya terkait dengan tiga isu utama yang menjadi perhatian Amerika di Timur Tengah termasuk masalah keamanan, kepentingan dalam cadangan minyak, dan isu Palestina. Faktor-faktor ini juga saling berkaitan dengan stabilitas di Timur Tengah.

Hasil yang telah dicapai Amerika dalam percaturan dunia internasional, membawa Amerika sebagai negara adidaya satu-satunya dalam konteks pasca-Perang Dingin. Sementara itu, kepentingan Amerika di Timur Tengah tumbuh

secara eksponensial, dan keterlibatan ini terus berlanjut. Terdapat lima tujuan utama Amerika di kawasan Timur Tengah yang mencakup: mengamankan akses strategis untuk minyak di wilayah teluk, mendukung dan melindungi kedaulatan Israel, mempertahankan pangkalan militer Amerika terutama di wilayah teluk, membela klien-negara dan rezim ramah, dan menolak gerakan-gerakan Islam dan kelompok-kelompok teroris seperti Hamas, Al-Qeada, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Kelima minat utama Amerika sebagai berikut:

1). Mempertahankan akses strategis untuk minyak di wilayah Teluk

Kepentingan utama Amerika di kawasan Timur tengah adalah untuk menjamin akses minyak di kawasan tersebut. Pada akhir abad ke sembilan belas dan awal abad kedua puluh, industry minyak bumi dan konsumsi produk berbasis minyak berkembang pesat di seluruh dunia terutama di Eropa dan Amerika Utara. Selama Perang Dunia I, kekuatan utama dunia mulai memprioritaskan minyak sebagai sebagai aset militer penting. Kebutuhan minyak bumi menjadi kebutuhan penting pada konteks perang modern seperti penggunaan minyak pada kapal-kapal, pesawat terbang, tank, kapal selam, dan pelumasan sanapan modern. Penggunaan minyak pada Perang Dunia I, menyebabkan krisis minyak pada tahun 1917-1918 (Paul, 2002).

Setelah Perang Dunia I, beberapa negara Barat memperoleh konsesi bersama di Timur Tengah, terutama di Iran, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi. Gagasan dibalik konsesi bersama ini adalah untuk menegosiasikan solusi untuk agenda politik dan bisnis yang tidak sesuai serta membuat ekspolasi

kewirausahaan lebih aman. Pada akhir Perang Dunia II, pemerintah Amerika menjadi waspada terhadap pengurangan produksi minyak dan kemungkinan cegukan ekonomi yang berasal dari kekurangan bahan bakar. Untuk mencegah hal tersebut, Amerika membuat tuntutan ekonomi yang berupa konsesi terhadap beberapa negara Timur Tengah. Berikut beberapa tuntutan Amerika terhadap beberapa negara pada tahun 1948. Amerika menuntut agar beberapa perusahaan dikembangkan untuk melakukan eksploitasi seperti: Arabian American Oil Company (ARAMCO) milik perusahaan Esso (sekarang Exxon), dan Standard Oil of California (SoCal). Perusahaan-perusahaan ini mensurvei dan mengembangkan ladang produksi besar yang memungkinkan mereka memanen keuntungan besar-besaran dari minyak yang berbiaya rendah yang akan digunakan untuk membangun kembali ekonomi Eropa dan Jepang yang telah hancur selama Perang Dunia II

James L, Gelvin dalam bukunya, *The Modern Middle East: A History*, menjelaskan bahwa diantara tujuan yang paling penting Amerika di kawasan Timur Tengah adalah untuk menjamin akses Barat terhadap minyak. Hal tersebut menurut James L, Gelvin terbagi menjadi dua faktor yaitu: pertama, tentunya faktor ekonomi yang mejadi alasan utama, kedua, kebijakan strategis ditentukan oleh fakta bahwa Amerika harus menambah produksi minyak dalam negeri yang bersumber dari Timur Tengah. Hal tersebut sesuai dengan fakta pada tahun 1973 sebanyak sepertiga dari impor minyak Amerika berasal dari Timur Tengah (Gelvin, 2005).

2). Mendukung dan melindungi kedaulatan Israel

Kepentingan kedua Amerika di kawasan Timur Tengah adalah menjaga negara Israel dan menjamin stabilitas di wilayah tersebut. Faktanya, mempertahankan Israel yang kuat di Timur Tengah memantapkan kepentingan keamanan nasional Amerika disana. Perspektif ini telah mendominasi kebijakan politik luar negeri Amerika sejak pertengahan abad kedua puluh.

Tanah Palestina yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman sampai akhir Perang Dunia I, diambil alih oleh Inggris sebagai mandat Liga Bangsa-bangsa. Selama Perang Dunia I (1914-1918), perjanjian rahasia dibuat antara pemerintah Inggris dan tokoh masyarakat Zionis Inggris yang mengarah ke '*Deklarasi Balfour*' dan mendirikan 'Rumah Nasional' bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Sebelum mengumumkan Deklarasi Balfour, pemerintah Inggris berusaha membujuk Presiden Woodrow Wilson untuk mendukung Deklarasi Balfour. Awalnya, Wilson enggan untuk melakukannya karena ia berpikir bahwa deklarasi tersebut akan memperburuk hubungan Amerika-Ottoman. Akhirnya di bawah tekanan Louis D.Brandeis, seorang pimpinan Zionis berpengaruh di Amerika dan merupakan teman dekat Wilson, akhirnya Presiden Wilson menunjukkan simpati terhadap Deklarasi Balfour. Pada September 1922, Kongres mengadopsi resolusi dan menyetujui

Deklarasi Balfour dengan demikian secara resmi Amerika melalui kebijakan luar negerinya mendukung migrasi Yahudi ke Palestina.

Komite PBB khusus Palestina (UNSCOP) mengusulkan petisi Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Pada tanggal 29 November 1947, “Petisi Rencana” telah disetujui oleh Majelis Umum PBB. Setelah “Petisi Rencana” disahkan, pemerintah Truman terus mempromosikan imigrasi Yahudi ke Palestina dan pembentukan persemakmuran egaliter. Kongres mengadopsi sebuah resolusi pada bulan Desember 1947 dengan tujuan eksplisit. Pada tanggal 14 Mei 1948, Negara Israel mengumumkan kemerdekaannya. Pada titik ini, tanah Palestina mulai dikenal sebagai Israel. Setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, Amerika menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan mereka. Dukungan Amerika terhadap Israel terus berlanjut dan tercatat di beberapa kejadian yang melibatkan Israel seperti Perang Arab-Israel 1948, dan Perang enam hari 1967. Berdasarkan beberapa kejadian tersebut Amerika memberikan dukungannya terhadap Israel baik secara ekonomi dan bantuan militer. Tidak hanya sampai disitu dukungan Amerika melalui resolusi PBB membantu Israel melakukan resolusi damai dengan negara yang berperang dengan Israel. Negara-negara Arab dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menjamin keberlanjutan Israel, perjanjian perdamaian Israel-Mesir 1979, perjanjian Oslo I, II, perjanjian

damai Israel-Jordan merupakan bentuk dukungan Amerika terhadap Israel dengan tujuan mempertahankan posisi Israel di Timur Tengah.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jelas bahwa hubungan Israel-Amerika sangat baik. Terlihat juga sejak puncak Perang Dingin, Israel menjabat sebagai pelindung terhadap ancaman komunisme Soviet dan gerakan nasionalisme Arab di Timur Tengah. Selain itu terdapat pula kerjasama berupa perjanjian di antara kedua negara tersebut yaitu *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC) yang semakin memperkuat hubungan kerjasama kedua negara tersebut (Education, 2016).

3). Mempertahankan pangkalan Amerika Serikat

Kepentingan ketiga Amerika di kawasan Timur Tengah adalah mempertahankan pangkalan militernya. Sebelum Perang Dunia II, jumlah pangkalan militer Amerika di luar negeri terbatas. Namun pada era Perang Dingin, jumlah pangkalan militer Amerika meningkat pesat di seluruh dunia. Menurut keterangan Alexander Cooley dari *United State Departement of Defense's 2006 Base Structure Report*, Amerika secara resmi mempertahankan 766 instalasi militer di luar negeri dari 77 negara di luar Amerika (Sarhan A. S., 2017).

Sebelum tahun 1980, Amerika mempertahankan kehadiran militer minimal di Timur Tengah. Pada awal tahun 1970-an, Amerika melakukan perjanjian dengan Bahrain untuk penggunaan fasilitas angkatan laut oleh Angkatan Laut Amerika dengan biaya sewa sebesar \$ 4 juta USD per tahun. Namun, pasca perang Arab-Israel 1973, Bahrain tidak lagi mendukung kehadiran militer Amerika. Kemudian, terjadinya Revolusi Iran dan invasi Soviet di Afganistan yang dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika di kawasan Timur Tengah mengingat lokasi tersebut menyimpan kekayaan minyak bumi terbesar di dunia. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Jimmy Carter yang menyatakan bahwa Amerika akan mempertahankan kepentingannya di kawasan Teluk dari kekuatan luar dengan cara apapun yang diperlukan, termasuk aksi militer. Pada era Presiden Ronald Reagan Amerika membentuk *United States Central Command* (CENTCOM) dengan tujuan untuk mengakomodasi misinya di wilayah tersebut.

Misi utama dari CENTCOM adalah untuk mengamankan kondisi stabilitas kawasan, keamanan, dan kemakmuran dengan membangun hubungan kerjasama antara negara, dalam menghadapi krisis, membatasi dan mencegah agresi, serta mendukung pembangunan dan rekonstruksi. Selain melakukan operasi gabungan militer, pendidikan, pelayanan manusia, CENTCOM juga berfungsi untuk menjaga akses fasilitas di Timur Tengah serta memperkuat hubungan dengan para pemimpin lokal.

4). Membela klien-negara dan rezim

Kepentingan keempat Amerika di kawasan Timur Tengah adalah mempertahankan hubungan dekat dengan “klien-negara” dan rezim. Dalam kamus Pemerintah dan Politik hal tersebut dapat diartikan sebagai negara yang bergantung pada negara lain untuk hal-hal seperti pertahanan, perdagangan, dll. Sementara dalam buku *The Guide to Internasional Relations and Diplomacy* klien-negara dapat diartikan sebagai negara yang secara ekonomi, politik, dan militer bergantung pada negara lain.

Runtuhnya kekuasaan tradisional dunia (Ottoman, Inggris, dan Prancis) di Timur Tengah, negara-negara yang baru merdeka menghadapi kesulitan ekonomi yang cukup besar dan mereka sangat bergantung pada bantuan asing. Selama Perang Dingin, Amerika dan Soviet muncul sebagai negara penyedia bantuan. Kedua negara adidaya tersebut mengakui pentingnya kawasan untuk kepentingan keamanan nasional mereka. Dengan demikian, mereka berusaha memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan tersebut dan membangun apa yang kemudian dikenal sebagai klien-negara. Pembagian negara-negara di kawasan tersebut dibagi menjadi dua, dengan beberapa negara memberikan dukungan terhadap Soviet dan negara-negara lain mendukung Amerika.

Kegiatan Amerika bukan hal baru di kawasan tersebut. Sejak awal tahun 1940-an, Amerika telah berjanji untuk memberikan bantuan ekonomi,

militer, dan perlindungan kepada beberapa negara di Timur Tengah untuk menjaga keamanan nasional dan kepentingan strategisnya di sana. Berikut beberapa negara yang menjadi “klien-negara”: Arab Saudi (1945), Turki (1947), Israel (1948), Iran (1953), Pakistan (1954), Lebanon (1957 dan berakhir pada 1975), Yordania (1963), Tunisia (1974), Mesir (1976), Kuwait, Bahrain, dan Oman (1991-1992). Beberapa negara tersebut merupakan klien-negara yang menerima bantuan dari Amerika.

Bantuan Amerika berlanjut pada rezim di Timur Tengah. Namun, dengan dimulainya *Arab Spring* 2010-2011, kebijakan luar negeri Amerika berubah terhadap rezim berubah. Amerika memutuskan untuk mendukung individu dalam revolusi bukannya mendukung rezim mereka. Keputusan ini berlawanan dengan pendekatan Amerika sebelumnya seperti di Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, Bahrain, dan Yaman.

5). Menolak Gerakan Islam dan Kelompok Teroris

Kepentingan kelima kebijakan luar negeri Amerika di kawasan Timur Tengah yaitu melawan gerakan Islam dan kelompok-kelompok teroris. Amerika dan sekutunya mengancam invasi yang dilakukan oleh Soviet di Afghanistan pada tahun 1979. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Carter, Amerika akan melakukan berbagai cara agar kepentingan mereka di kawasan bisa dipertahankan termasuk penggunaan militer. Hal tersebut dibuktikan oleh Amerika dan sekutunya yang memberikan bantuan dana dan persenjataan

terhadap kelompok Taliban agar melakukan perlawanan terhadap Soviet. Bantuan yang diberikan Amerika dan sekutunya terhadap kelompok Taliban membuat Soviet mengalami banyak kerugian. Perang antara kelompok Taliban yang didukung oleh Amerika melawan Soviet merupakan salah satu faktor yang meruntuhkan kekuasaan Soviet di dunia. Hal ini karena kerugian besar yang dialami oleh negara komunis tersebut akibat perang berkepanjangan di Afghanistan.

Setelah lepas dari Soviet Afghanistan dikuasai oleh rezim Taliban dalam berbagai lini pemerintahan. Amerika yang sebelumnya memberikan dukungannya terhadap Taliban mulai berbalik dan tidak lagi mendukung rezim tersebut. Taliban dianggap bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di Afghanistan. PBB melalui resolusi mendesak agar rezim Taliban menghentikan kekerasan dan penindasan terhadap wanita, dan PBB menjatuhkan sanksi karena Taliban dianggap melindungi kelompok Al-Qaeda dan para pemimpinnya. Tuntutan PBB tidak mendapatkan tanggapan oleh kelompok Taliban bahkan, pada tahun 1998, Al-Qaeda dituduh bertanggung jawab atas tindakan pengeboman kedutaan Amerika di Afrika Utara. Akibatnya, Amerika menuduh rezim Taliban menyediakan tempat dan menyembunyikan kelompok Al-Qaeda dan pemimpinnya Osama bin Laden.

Serangan 11 September 2001 yang terjadi di Amerika, membuat pemerintah Amerika menyatakan “Perang Melawan Terorisme”. Bush

menuduh Al-Qaeda dan Osama bin Laden merupakan sosok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pada tanggal 7 Oktober 2001, Amerika dan NATO melakukan misi “*Operation Enduring Freedom*” untuk melakukan penyerangan di Afghanistan dengan tujuan menggulingkan rezim Taliban yang dianggap memfasilitasi kelompok Al-Qaeda serta menyembunyikan Osama bin Laden. Invasi Amerika di Afghanistan mulai berakhir pada era Presiden Obama pada tanggal 28 Desember 2014. Melalui Menteri Pertahananya Chuck Hegel, misi kurang lebih 13 tahun Amerika di Afghanistan dinyatakan berakhir. Aksi melawan teroris Amerika tidak akan berhenti walaupun orang penting seperti Osama bin Laden sudah terbunuh tetapi Amerika melalui politik luar negerinya berkomitmen untuk menjaga keamanan dunia dari ancaman gerakan-gerakan radikal dan kelompok teroris (DEFENSE, 2014).

Kehadiran Amerika di Timur Tengah menjadikan kawasan ini semakin menarik untuk dibahas. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat terdapat lima minat utama yang menjadi motif Amerika dalam menjalankan kepentingan politik luar negerinya di Timur Tengah. Tentunya, tujuan utama Amerika di kawasan ini yaitu kepentingan akan minyak bumi walaupun dengan maksud Amerika terus menerus berdalih kalau tujuan mereka di Timur Tengah yaitu memberantas aksi teroris demi menjaga stabilitas kawasan.